

## DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Behn, R. D. (1995). "The Big Questions of Public Management". *Public Administration Review*, 55(4), 313-324.
- Boyne, G. A. (2002). "Public and Private Management: What's the Difference?". *Journal of Management Studies*, 39(1), 97-122.
- Fauzi, A. N., & Rostyaningsih, D. (2018). Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Semarang *Smart City*. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(4), 356-374.
- Fukuyama, F. (2004). "State-Building: Governance and World Order in the 21st Century". Cornell University Press.
- Hupe, P., & Hill, M. (2007). "Street-Level Bureaucracy and Public Accountability". Palgrave Macmillan.
- Indrajit, Richardus Eko. 2004. Electronic Government. Yogyakarta: Andi Publisher
- Indrajit, Richardus Eko. 2006. Electronic Government : Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi. Jakarta : Aptikom
- Jones, C. O. (1970). "An Introduction to the Study of Public Policy". Wadsworth Publishing.
- Nazir, Mohammad. 1998. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pollitt, C. (2003). "The Essential Public Manager". Open University Press
- Pramono, S. E. (2022). Kajian kesiapan (e-readiness) kecamatan dalam penerapan *E-Government* Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 15(2), 8-18.
- R. A. W. (1996). "The New Governance: Governing without Government". *Political Studies*, 44(4), 652-667.
- Rachmawati, R. (2018). Pengembangan *Smart village* untuk penguatan *Smart City* dan *Smart regency*. *Jurnal Sistem Cerdas*, 1(2), 12-19.
- Rafi Candra Naufal. 2023. Penerapan E-GOV Kota Semarang pada tingkat Kelurahan (Studi Kasus Kelurahan Jangli Kota Semarang Tahun 2023). Universitas Diponegoro

- Ramdani Mustika Endah. 2018. Analisis Efektivitas Pelaksanaan *E-Government* di Tingkat Kelurahan. Jurnal SAWALA. Vol.6. No.1.
- Saputra, D. A. D., KiSmartini, K., Dwimawanti, I. H., & Afrizal, T. (2022). Mewujudkan Semarang hebat melalui *Smart City* (studi kasus pada dimensi *Smart economy* Kota Semarang). *PERSPEKTIF*, 11(3), 1043-1049.
- Somantri dan Indra. 2017. Implementasi *E-Government* Pada Kelurahan Pesurungan Lor Kota Tegal Berbasis Service Oriented Architecture. Jurnal Informatika : Jurnal Pengembangan IT (JPIT). Vol. 2. No. 1.
- Stoker, G. (1998). "Governance as Theory: Five Propositions". *International Social Science Journal*, 50(155), 17-28.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Umar, Husein. 2013. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis (2nd ed.). Jakarta: Rajawali pers.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. (2025). E- Makaryo: Bursa kerja Provinsi Jawa Tengah.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2025). SIAPkerja: Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan.
- Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. (2025). Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SIKER).
- Nabila, D. S. (2025, Mei 23). Wawancara tentang penggunaan dan pengalaman terhadap website SIKER Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang (Wawancara pribadi).

## PERATURAN DAN PERUNDANGAN

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang mengatur Struktur Organisasi di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Peraturan WaliKota Semarang Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Peraturan WaliKota Semarang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pembagian Urusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Provinsi/Kota.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang Mengatur Segala Aspek Ketenagakerjaan di Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). International Organization for Standardization. (2013). *ISO/IEC 27001:2013 – Information technology – Security techniques – Information security management systems – Requirements*.

International Organization for Standardization. (2019). *ISO/IEC 27701:2019 – Security techniques – Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management – Requirements and guidelines*.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2017). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

## WEBSITE RESMI

*Website Kota Semarang*

*Website Kecamatan Banyuwangi*

*Website Kota DKI Jakarta*

*Website Smart City Kota Semarang*

*Website Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang*

*Website SIKER Dinas Tenaga Kerja*